**BAB V**

**STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

**Strategi Dan Kebijakan**

Strategi dan Kebijakan Dinas Kesehatan adalah suatu cara untuk mencapai tujuan, sasaran jangka menengah, dan target kinerja hasil (*outcome*) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Kesehatan.

**Tabel 4.12**

**Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **VISI : Terwujudnya Sumatera Barat yang Madani dan Sejahtera** | | | |
| **MISI 3 : Meningkatkan Sumberdaya Manusia yang Cerdas, Sehat, Beriman, Berkarakter, dan Berkualitas Tinggi** | | | |
| **Tujuan** | **Sasaran** | **Strategi** | **Kebijakan** |
| 1. Meningkatkan mutu dan ketersediaan SDM kesehatan sesuai standar yang didukung ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan serta mutu pelayanan yang sesuai standar pelayanan. | 1. Meningkatnya Mutu Sumber Daya Kesehatan | Meningkatkan jumlah dan kualitas sumber daya kesehatan | Peningkatan jumlah dan kualitas sumberdaya kesehatan yang memiliki kompetensi dan terstandarisasi |
| Meningkatkan jumlah dan kualitas sumber daya kesehatan serta kefarmasian dan alat kesehatan | Peningkatan ketersediaan, keterjangkauan, pemeratan dan kualitas farmasi dan alat kesehatan ; |
| Meningkatkan kualitas pelayanan dasar dan rujukan yang berkualitas  Meningkatkan Rumah Sakit daerah yang terakreditasi  Meningkatkan cakupan akses, keterjangkauan dan mutu pelayanan kesehatan | Peningkatan pelayanan dasar dan rujukan yang berkualitas;    Peningkatan akreditasi rumah sakit daerah;  Peningkatan cakupan akses, keterjangkauan dan mutu pelayanan kesehatan |
|  |  | Meningkatkan keterpaduan dalam pelayanan kesehatan masyarakat yang lebih merata  Meningkatkan akses layanan kesehatan dasar dan rujukan yang berkualitas | Peningkatan pelayanan dasar dan rujukan yang berkualitas;  Peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan anak ;  Peningkatan cakupan akses, keterjangkauan dan mutu pelayanan kesehatan |
| Meningkatkan upaya kesehatan masyarakat melalui peningkatan upaya preventif dan promotif kesehatan serta pencegahan dan pengendalian penyakit | Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat | Meningkatkan penanganan masalah gizi kurang dan gizi buruk pada bayi, anak balita,ibu hamil dan menyusui | Peningkatan perbaikan gizi masyarakat  Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan dan gizi dengan fokus utama pada 1000 hari kehidupan manusia |
|  |  | Meningkatkan komitmen Pemerintah Daerah dalam peningkatan pembiayaan promotif dan preventif untuk layanan kesehatan | Peningkatan layanan kesehatan dengan lebih menitikberatkan pada upaya promotif dan preventif dibadingkan dengan upaya kuratif;  Pemberdayaan masyarakat dan peningkatan upaya promosi kesehatan;  Penguatan gerakan masyarakat, lembaga pemerintah dengan swasta dalam peningkatan upaya kesehatan masyarakat ; |
|  |  | Meningkatkan pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan; | Peningkatan pemerataan dan kualitas kesehatan lingkungan |
|  |  |  |  |
|  | Meningkatnya pencegahan dan pengendalian penyakit | Meningkatkan pengendalian penyakit menular dan tidak menular dan kesiapsiagaan tanggap darurat bencana dan kejadian luar biasa; | Peningkatan pencegahan dan pengendalian penyakit menular terutama HIV dan Tuberkulosis  Peningkatan kualitas pelayanan dan rehabilitasi gangguan kesehatan kejiwaan  Peningkatan upaya Pendeteksian dini penyakit tidak menular  Peningkatan sistim kewaspadaan dini dan respon terhadap kejadian luar biasa dan tanggapdarurat bencana |
|  |  |  |  |
| 3. Meningkatkan keikutsertaan masyarakat dalam program jaminan kesehatan nasional | 4. Meningkatnya kepesertaan Jaminan Kesehatan | Meningkatkan keberlanjutan jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin / kurang mampu. | Peningkatan efektifitas pembiayaan kesehatan ;  Menurunkan ketidaktepatan sasaran pemberian jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin. |
|  |  | Meningkatkan kepesertaan jaminan kesehatan non penerima bantuan iuran | Peningkatan kepesertaan mandiri, pekerja ;  Peningkatan keikutsertaan stakeholder, masyarakat dalam peningkatan kepesertaan jaminan kesehatan.  Peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang manfaat program JKN |
|  |  |  |  |
| **Misi 4 : Meningkatkan tata pemerintahan yang baik, bersih dan profesional** | | | |
| 4. Meningkatkan tata kelola pemerintah yang baik dengan pelayanan publik yang prima, transparan, aspiratif dan partisipatif. | Meningkatnya tata kelola organisasi | Meningkatkan sistem serta sarana prasarana pelayanan publik berbasis teknologi informasi  Meningkatkan kualitas aparatur dalam pelaksanaan pelayanan publik  Membuka ruang partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan peningkatan pelayanan publik | Peningkatan pelimpahan kewenangan, penyederhanaan prosedur pelayanan dan perizinan  Peningkatan kualitas aparatur pelayanan, peningkatan kompetensi dan perubahan mentalitas/budaya melayani  Pengembangan inovasi pelayanan publik berbasis teknologi informasi yang terintegrasi  Penguatan integrasi berbagai jenis pelayanan publik (pelayanan satu pintu)  Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik  Peningkatan akses informasi publik yang akurat dan up to date  Peningkatan efektifitas pengawasan pelayanan publik  Penguatan sistem pengaduan masyarakat yang efektif dan terintegrasi  Penerapan penghargaan dan sanksi terhadap kinerja pelayanan publik |
|  |  | Meningkatkan keterpaduan dalam mengembangkan kapasitas dan manajemen aparatur  Meningkatkan manajemen pengelolaan kepegawaian yang efektif, efisien dan akuntabel berbasis teknologi informasi  Mengintensifkan penerapan sistem rekrutmen dan seleksi pengembangan karir secara transparan dan berbasis kompetensi | Peningkatan pengelolaan manajemen kepegawaian (rekruitmen, mutasi, promosi dan pengembangan karir aparatur)  Peningkatan penyelenggaran pendidikan dan pelatihan aparatur  Penyusunan Road Map diklat teknis dan fungsional  Evaluasi pelaksanaan diklat teknis dan fungsional  Peningkatan pendidikan dan pelatihan bagi aparatur berorientasi kewirausahaan  Peningkatan sarana dan prasarana serta tenaga pengajar pada penyelenggaraan lembaga pendidikan dan latihan |
|  |  | Meningkatkan pengawasan internal dan eksternal serta pengawasan masyarakat dan ketegasan tindaklanjut  Meningkatkan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah  Meningkatkan kompetensi dan integritas aparatur pengadaan barang dan jasa  Melakukan penguatan kelembagaan pengadaan barang dan jasa  Mengembangkan dan memanfaatkan sistem informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan (e-Government)  Melakukan penyempurnaan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan nagari/desa/ kelurahan  Meningkatkan keterbukaan dan akses masyarakat terhadap informasi publik  Meningkatkan kualitas produk hukum daerah | Penetapan indikator kinerja daerah, Perangkat Daerah dan individu aparatur.  Penertiban dan tindaklanjut Laporan Harta Kekayaan  Penyelenggara Negara (LHKPN)  Peningkatan kapasitas pengawasan melalui peningkatan independensi Aparatur Pengawasan Internal Pemerintah (APIP)  Peningkatan jumlah, kompetensi, dan integritas auditor intern dan ekstern  Pengembangan sistem pengaduan masyarakat yang efektif  Percepatan penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis accrual  Pemantapan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)  Peningkatan kualitas implementasi sistem e- procurement  Implementasi penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang efektif dan efisien.  Peningkatan transparansi melalui pengelolaan dan pelayanan informasi publik  Penataan pemerintahan nagari desa/ kelurahan  Percepatan penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis accrual  Peningkatan pengamanan dan penertiban Barang Milik Daerah (BMD)  Modernisasi pengelolaan barang milik daerah  Peningkatan kualitas proses pengadaan barang dan jasa.  Penyusunan Peraturan pengelolaan pendapatan daerah  Peningkatan efektifitas dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah.  Pengembangan sistim informasi pengelolaan keuangan daerah  Peningkatan kompetensi aparatur pengelola keuangan daerah  Pelaksanaan pembinaan pengelolaan keuangan daerah Kabupaten/Kota yang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku  Penerapan tertib arsip daerah berbasis teknologi infomasi  Penyusunan produk hukum daerah yang responsif terhadap kepemerintahan yang baik |
|  |  | Meningkatkan keterpaduan, sinergitas, sinkronisasi dan kerjasama dalam pengelolaan pembangunan.  Meningkatkan kualitas dan sinergitas proses penyusunan perencanaan pembangunan daerah | Penyelarasan fungsi perencanaan, penganggaran, monoitoring dan evaluasi serta pelaporan berbasis Teknologi Informasi Komunikasi (TIK)  Peningkatan transparansi melalui pengelolaan dan pelayanan informasi  Peningkatan kualitas koordinasi dengan semua stakeholder terkait |